



**PERATURAN DESA MANGUNSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MANGUNSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG**



**KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA MANGUNSARI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGUNSARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik

- 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
- 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
- 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 36);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
- 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8)
- 27 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);

- 28 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2026 Desa (Lembaran Desa Mangunsari Tahun 2020 Nomor 3);
- 29 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGUNSARI
Dan
KEPALA DESA MANGUNSARI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANGUNSARI Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

| | | |
|--|---|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | R | 1.521.994.164,00 |
| | P | |
| 2. Belanja Desa | R | 1.646.527.460,00 |
| | P | |
| Surplus/Defisit | R | (124.533.296,00) |
| | P | |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | R | 124.533.296,00 |
| | P | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | R | 0,00 |
| | P | |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | R | 124.533.296,00 |
| | P | |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | R | 0,00 |
| | P | |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANGUNSARI.



Diundangkan di : Mangunsari
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Sekretaris Desa Mangunsari


MUJIDUN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.400.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.493.722.414,00 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7.871.750,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.521.994.164,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 451.953.752,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 519.700.708,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 656.873.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 18.000.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.646.527.460,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (124.533.296,00) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 124.533.296,00 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 124.533.296,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 124.533.296,00 | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Mangunsari, 31 Desember 2024
 Kepala Desa Mangunsari
 KEPALA DESA
 MANGUNSARI
 ISRO
 KECAMATAN WINDUSARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|--|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 20.400.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.493.722.414,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 7.871.750,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.521.994.164,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>690.797.460,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 558.114.748,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 54.786.000,00 | ADD |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 54.786.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 324.930.000,00 | ADD |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 324.930.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 17.244.752,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 17.244.752,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) | 56.750.996,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 56.750.996,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 28.405.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 28.405.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 2.610.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.610.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 22.800.000,00 | ADD |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 22.800.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 24.000.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |
| 1.1.90 | | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 26.588.000,00 | ADD, PAD |
| 1.1.90 | 5.1. | Belanja Pegawai | 26.588.000,00 | |
| 1.2. | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 63.500.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 63.500.000,00 | ADD, PBH |
| 1.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.400.000,00 | |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 60.100.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 8.200.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 1.200.000,00 | ADD |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 5.300.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.300.000,00 | |
| 1.3.90 | | Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM) | 1.700.000,00 | DDS |
| 1.3.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.700.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 47.610.962,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6.900.000,00 | ADD |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.900.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.195.000,00 | ADD |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.195.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 7.000.000,00 | DDS |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | |
| 1.4.05 | | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 6.200.000,00 | ADD |
| 1.4.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.200.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 3.800.000,00 | ADD |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.800.000,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1.200.000,00 | ADD |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000,00 | |
| 1.4.09 | | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 6.500.000,00 | ADD |
| 1.4.09 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | |
| 1.4.92 | | Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa | 11.815.962,00 | ADD |
| 1.4.92 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.815.962,00 | |
| 1.5. | | Sub Bidang Pertanahan | 13.371.750,00 | |
| 1.5.06 | | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 7.871.750,00 | DLL |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.871.750,00 | |
| 1.5.07 | | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | 5.000.000,00 | DDS |
| 1.5.07 | 5.3. | Belanja Modal | 5.000.000,00 | |
| 1.5.91 | | Pengukuran, Pelaksanaan dan Sketsa Peta Batas Desa | 500.000,00 | DDS |
| 1.5.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>736.407.000,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 5.700.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 5.700.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.700.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 58.510.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif) | 28.092.000,00 | DDS |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.092.000,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 13.030.000,00 | DDS |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.030.000,00 | |
| 2.2.97 | | Fasilitas Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu | 17.388.000,00 | DDS |
| 2.2.97 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.388.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 585.103.000,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 221.559.000,00 | DDS |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 221.559.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 116.746.000,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 116.746.000,00 | |
| 2.3.12 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 104.478.000,00 | DDS |
| 2.3.12 | 5.3. | Belanja Modal | 104.478.000,00 | |
| 2.3.14 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll) | 63.037.000,00 | DDS |
| 2.3.14 | 5.3. | Belanja Modal | 63.037.000,00 | |
| 2.3.90 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan T anah | 79.283.000,00 | DDS |
| 2.3.90 | 5.3. | Belanja Modal | 79.283.000,00 | |
| 2.4. | | Sub Bidang Kawasan Permukiman | 86.094.000,00 | |
| 2.4.12 | | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) | 86.094.000,00 | PBK |
| 2.4.12 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 83.424.000,00 | |
| 2.4.12 | 5.3. | Belanja Modal | 2.670.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.000.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.000.000,00 | ADD |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>58.360.000,00</u> | |
| 3.1. | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 12.000.000,00 | |
| 3.1.03 | | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 8.000.000,00 | DDS |
| 3.1.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | |
| 3.1.91 | | Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB | 4.000.000,00 | DDS |
| 3.1.91 | 5.3. | Belanja Modal | 4.000.000,00 | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 26.000.000,00 | |
| 3.2.02 | | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot) | 1.000.000,00 | DDS |
| 3.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 24.000.000,00 | DDS |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.93 | | Pengiriman Kontingen Lomba Keagamaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota) | 1.000.000,00 | DDS |
| 3.2.93 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | |
| 3.3. | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 2.000.000,00 | |
| 3.3.01 | | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota | 2.000.000,00 | ADD |
| 3.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 3.4. | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 18.360.000,00 | |
| 3.4.03 | | Pembinaan PKK | 18.360.000,00 | DDS |
| 3.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.360.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>142.963.000,00</u> | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 76.122.000,00 | |
| 4.2.91 | | Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan | 76.122.000,00 | DDS |
| 4.2.91 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 76.122.000,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 62.000.000,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 52.000.000,00 | DDS |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 52.000.000,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 10.000.000,00 | DDS |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 1.341.000,00 | |
| 4.4.02 | | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 1.341.000,00 | DDS |
| 4.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.341.000,00 | |
| 4.5. | | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 500.000,00 | |
| 4.5.90 | | Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa | 500.000,00 | DDS |
| 4.5.90 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 500.000,00 | |
| 4.6. | | Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | 3.000.000,00 | |
| 4.6.01 | | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) | 3.000.000,00 | DDS |
| 4.6.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u> | <u>18.000.000,00</u> | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 18.000.000,00 | |
| 5.3.90 | | BLT Dana Desa | 18.000.000,00 | DDS |
| 5.3.90 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 18.000.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.646.527.460,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (124.533.296,00) | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 124.533.296,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | 124.533.296,00 | |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

